

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan rahmatnya “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selama tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan ruang dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Dengan adanya Laporan ini menjadi wujud pertanggungjawaban kepada publik serta menginformasikan kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, terutama kepada seluruh pegawai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkoordinasi dengan baik dan berkontribusi secara proporsional baik langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh rangkaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang.

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto
NIP 196803121998031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan pemda, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Perjanjian Kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 memuat 23 (dua puluh tiga) sasaran yang ingin dicapai, terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis, 7 (tujuh) sasaran khusus dan 3 (tiga) sasaran operasional. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sasaran guna mengukur pencapaian sasaran dimaksud. Semua sasaran tahun 2021 dapat dikatakan telah dapat dicapai dengan baik sebagaimana tercermin dalam hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata sebesar 100,07%, sesuai tabel berikut:

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------|--|---|--------|-----------|---------|
| SASARAN STRATEGIS | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | 39% | 28,01% | 128,18% |
| 2 | Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur | Persentase gedung pemda yang memenuhi standar | 58% | 58,76% | 101,31% |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | 86,56% | 95,12% |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | 100% | 99,78% | 99,78% |
| 5 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | 100% | 100% | 100% |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|--------|-----------|---------|
| 6 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) | 100% | 98,50% | 98,50% |
| 7 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) | 100% | 97,50% | 97,50% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) | 100% | 97,50% | 97,50% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | 100% | 98,38% | 98,38% |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------|--|--|---------|-----------|---------|
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (KSD Nomor 70) | 100% | 100% | 100% |
| SASARAN KHUSUS | | | | | |
| 14 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan keuangan daerah | WTP (3) | WTP (3) | 100% |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------------|---|---|--------|-----------|----------------|
| 18 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | A (81) | 90,55 | 111,79% |
| 20 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Nilai PMPRB Perangkat Daerah | 92 | 84,57 | 91,92% |
| SASARAN OPERASIONAL | | | | | |
| 21 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 83,34% | 83,34% |
| 22 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 99,65% | 99,65% |
| 23 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 99% | 99% |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 100,07% |

Dari semua sasaran yang menjadi obyek perjanjian kinerja di tahun 2021, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) DCKTRP Provinsi DKI Jakarta yang menjadi bagian dari indikator kinerja sasaran strategis antara lain: (1) Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana (*Capaian 128,18%*), (2) Persentase gedung pemda yang memenuhi standar (*Capaian 101,31%*), dan (3) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (*Capaian 95,12%*).

Secara umum, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta telah berusaha memaksimalkan pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Indikator Kinerja Utama DCKTRP merupakan indikator kinerja hasil (outcome) yang pencapaiannya tidak dihasilkan secara langsung melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan DCKTRP sendiri melainkan terkait dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sektoral lainnya. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan

capaian sasaran strategis Perangkat Daerah DCKTRP ini tidak dapat sepenuhnya menggambarkan ukuran keberhasilan DCKTRP semata. Keberhasilan atau kegagalan capaian akan sangat tergantung pada sinergisitas rencana pembangunan yang terpadu antar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Ruang Lingkup | 2 |
| D. Gambaran Umum Organisasi | 3 |
| E. Isu Strategis..... | 6 |
| F. Sistematika Penyajian | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 8 |
| A. Aspek Strategis Organisasi | 8 |
| B. Visi dan Misi | 9 |
| C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD | 11 |
| D. Strategi dan Kebijakan..... | 12 |
| E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 15 |
| F. Program dan Anggaran Tahun 2021 | 29 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 30 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 31 |
| A.1. Target Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi..... | 31 |
| A.2. Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi..... | 35 |

| | |
|--|-----|
| A.3. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya..... | 61 |
| A.4. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya..... | 73 |
| A.5. Perbandingan Dengan Target Nasional..... | 86 |
| B. Realisasi Anggaran..... | .86 |
| BAB IV PENUTUP | 108 |

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) selaku Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi dan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berada di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) pada Pergub 279 tahun 2016, fungsi Dinas adalah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan wujud dalam menjalankan fungsi tersebut. Sedangkan metodologi penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini adalah untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2021, dengan membandingkan capaian kinerja Dinas (performance results) terhadap rencana kinerja Dinas (performance plan).

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 ini dipisahkan dalam 2 (dua) aspek kepentingan/keperluan, yaitu:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan organisasi eksternal, menjadikan LKIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2021.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan organisasi internal, menjadikan LKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja organisasi dan upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sehingga untuk setiap celah kinerja (performance gap) yang ditemukan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah pada pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi dan urusan pemerintahan bidang pertanahan di Provinsi DKI Jakarta.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi DCKTRP Provinsi DKI Jakarta

Tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 adalah melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Sedangkan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 adalah:

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
3. pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
4. perencanaan rencana rinci tata ruang;
5. pelaksanaan evaluasi rencana rinci tata ruang;
6. perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah daerah;
7. penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
8. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;
9. pemetaan ruang kota;
10. penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung;
11. perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
12. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
13. penegakan peraturan perundang – undangan daerah di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
14. pengelolaan pegawai, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

15. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
16. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
17. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

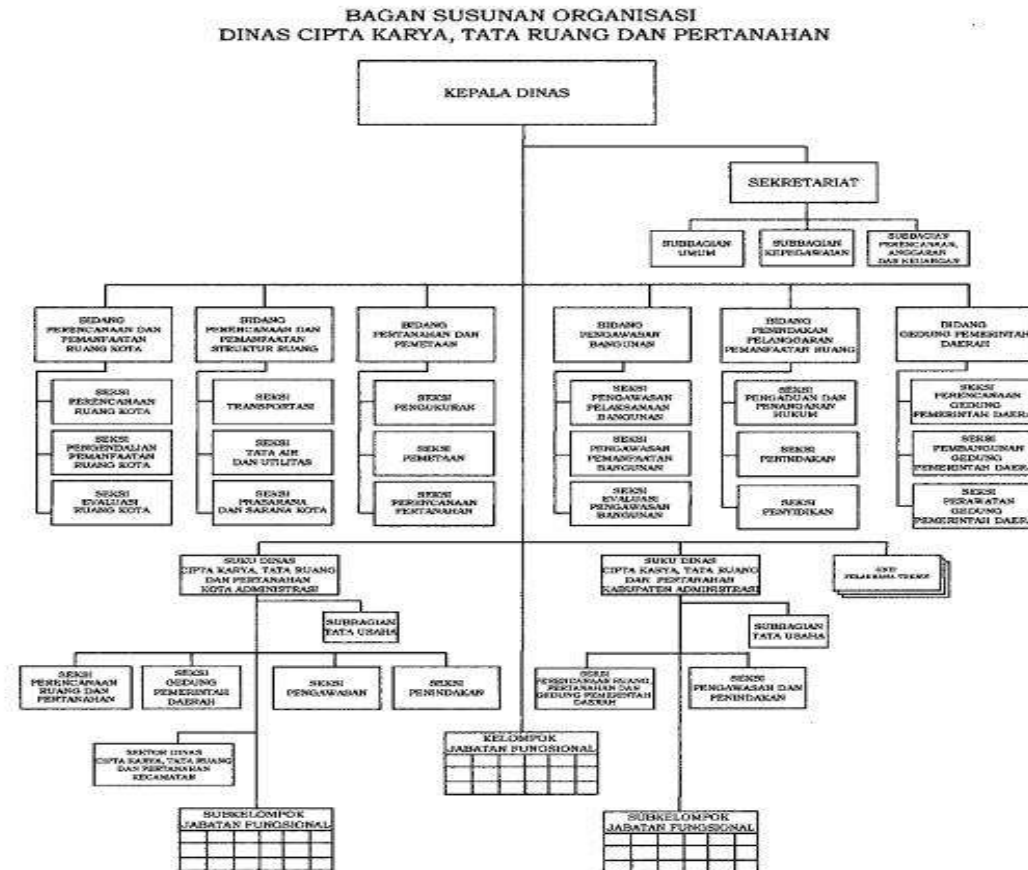
2. Susunan Organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dibekali dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota
4. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang
5. Bidang Pertanahan dan Pemetaan
6. Bidang Pengawasan Bangunan
7. Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
8. Bidang Gedung Pemerintah Daerah
9. Suku Dinas Kota
10. Suku Dinas Kabupaten
11. Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas
13. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi DCKTRP Provinsi DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat pada bagan susunan organisasi yang disajikan berikut ini.

Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan



E. ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan telaahan isu strategis kementerian serta telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, maka dapat dirumuskan isu strategis dari Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Konflik kebutuhan ruang yang tinggi dengan ketersediaan lahan yang terbatas;
- b. Pengawasan dan Penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Integrasi penataan ruang dan penataan pertanahan; dan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan konstruksi bangunan gedung pemerintah.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP tahun 2021 ini disajikan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang dibuatnya LKIP, maksud dan tujuan dibuatnya LKIP, ruang lingkup dan sistematika penyajian LKIP tahun 2021 serta gambaran umum organisasi yang isinya menjabarkan tentang tugas dan fungsi, susunan organisasi, aspek strategis serta pernyataan visi dan misi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun 2021 serta kaitannya dengan Renstra/RPJMD

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Berisi metodologi pengukuran pencapaian kinerja dinas tahun 2021 dan analisis atas pencapaian sasaran strategis tahun 2021, serta akuntabilitas keuangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Bab IV – Penutup

Menguraikan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2018-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

A. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai SKPD baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 279 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, sub bidang urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan Tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 sebagai berikut:

"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua"

Adapun penjabaran dari Visi di atas yakni keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan juga dilengkapi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat dimana masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dari 5 (lima) misi Kepala Daerah di atas ada dua misi yang terkait yakni misi kedua yaitu “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang” dan misi ketiga yaitu “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”.

Kalimat perbaikan pengelolaan tata ruang pada misi kedua “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”, pada hakikatnya merupakan upaya menjadikan penataan ruang sebagai salah satu alat untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perencanaan dan evaluasi ruang kota serta pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Sedangkan pada misi ketiga “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas” Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dituntut untuk menyiapkan sarana

tempat aparaturnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkarya, mengabdikan, melayani dan menyelesaikan permasalahan kota dan masyarakat secara profesional melalui kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan teknis bangunan gedung pemda.

C. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dalam menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan menetapkan tujuan jangka menengah 2018-2022, sebagai berikut:

1. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan produktivitas dan integritas aparaturnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;

Untuk mengukur ketercapaian tujuan di atas, ditetapkan sasaran untuk setiap tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dimana sasaran adalah hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu tujuan. Adapun sasaran dari setiap tujuan yang ditetapkan, yaitu:

1. Sasaran dari Tujuan Pertama adalah :
 - Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
2. Sasaran dari Tujuan Kedua adalah :
 - Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparaturnya.
3. Sasaran dari Tujuan Ketiga adalah :
 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran jangka menengah sangat dibutuhkan untuk mengaktualisasikan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut ke dalam kebijakan atau langkah-langkah yang lebih terarah. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder yang dilayaninya. Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Tahun 2018-2022 terangkum di dalam Tabel 2.1.

➤ **STRATEGI**

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan, strategi yang diambil sebagai berikut:

1. Mendorong pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar
3. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai
4. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai

➤ **KEBIJAKAN**

Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan masing-masing strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala
2. Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar
3. Meningkatkan sarana prasarana kantor yang sesuai standar melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta pengelolaan kendaraan operasional.

Tabel 2.1

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Tahun 2018-2022**

| VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| 1 | Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang | Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Mendorong pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang | Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, Pelaksanaan kebijakan satu peta, pembangunan sistem informasi tata ruang, penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 2 | Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas | Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan | Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar | Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar |
| | | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai | Meningkatkan sarana prasarana kantor yang sesuai standar melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta pengelolaan kendaraan operasional |

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil, disusun suatu perjanjian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan sebagai pihak pertama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran dan juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini juga merupakan komitmen dari segenap pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|--------------------------|---|-----|---|-------------|---|--------|-----|-----|-----|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| SASARAN STRATEGIS | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | 1 | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | e-SAKIP | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan pada Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ yang dihitung berdasarkan selisih antara implementasi dengan rencana dibagi dengan rencana, dengan menggunakan paramater subzona/kegiatan sesuai perda RDTR & PZ | N/A | N/A | N/A | 39% | 39% | Persentase |
| 2 | Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur | 1 | Persentase gedung pemda yang memenuhi standar | e-SAKIP | Gedung Pemda memenuhi standar adalah bangunan gedung pemda sesuai fungsi dan layak secara struktur dan ME, yang dikelompokkan menjadi : a. Bangunan gedung sederhana bertingkat paling tinggi 4 lantai yang berumur sampai dengan 25 tahun b. Bangunan gedung tidak sederhana bertingkat lebih dari 4 tahun yang berumur sampai dengan 25 tahun | N/A | N/A | N/A | 58% | 58% | Persentase |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | e-SAKIP | <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: (a). Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran = 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%); (b). Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya; dan c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai</p> | N/A | N/A | N/A | 91% | 91% | Persentase |
|---|--|---|--|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------|

berikut:

1. Serapan Anggaran =80%, Realisasi = (40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)
2. Serapan Anggaran <80%, Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)
3. Serapan Anggaran ≥80% namun output <100%, Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (efisiensi X 10%) + (pencapaian output X 50%)

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----|---|-------------|---|--------|------|------|------|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (Nomor 17) | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | Persentase |
| 5 | Meningkatnya akses sanitasi layak | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (Nomor 22) | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | Persentase |
| 6 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23) | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----|---|-----|--|-------------|--|--------|------|------|------|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| | | | Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) | | | | | | | | |
| 7 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (Nomor 28) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (Nomor 30) | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----|--|-------------|--|--------|------|------|------|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| | | 3 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (Nomor 31) | N/A | 100% | 100% | N/A | 100% | Persentase |
| | | 4 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73) | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | Persentase |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----|---|-------------|---|--------|------|------|------|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61) | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | Persentase |
| 9 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 10 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (Nomor 45) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63) | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----|--|-------------|--|--------|------|------|------|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| | berbasis teknologi informasi | | Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | | | | | | | | |
| 12 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (Nomor 53) | 100% | 100% | N/A | 100% | 100% | Persentase |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Nomor 72) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----------------------|---|-----|--|-------------|---|--------|------|------|------|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| 13 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta (KSD Nomor 70) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta (Nomor 70) | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | Persentase |
| SASARAN KHUSUS | | | | | | | | | | | |
| 14 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda | 1 | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP | e-Kinerja | Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi jumlah permohonan masuk yang lengkap dikali 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 15 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase | 1 | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP | e-Kinerja | Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trace yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi permohonan masuk yang lengkap dikali 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 16 | Meningkatkannya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Persentase Pemanfaatan E-Order | e-Kinerja | Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-Order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----|--|-----|-------------------------------|-------------|--|--------|----|-----|-----|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| 17 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Opini laporan keuangan daerah | e-Kinerja | Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)) | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | WTP |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|---|------|------|------|------|------|------------|
| 18 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | 1 | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | e-Kinerja | "a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfo menyusun editorial plan di level Provinsi. c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfo. d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang. Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan. c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan)." | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
|----|---|---|---|-----------|---|------|------|------|------|------|------------|

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----|---|-----|--|-------------|--|--------|-----|-----|--------|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| 19 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | e-Kinerja | Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 81) | N/A | N/A | N/A | A (81) | A (81) | Predikat |

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|-----|---|-----|------------------------------|-------------|---|--------|-----|-----|----|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| 20 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | 1 | Nilai PMPRB Perangkat Daerah | e-Kinerja | "Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30" | N/A | N/A | N/A | 92 | 92 | Nilai |

| No. | Sasaran | No. | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Target | | | | | Keterangan |
|----------------------------|---|-----|---|-------------|---|--------|------|------|------|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | Tahunan | |
| SASARAN OPERASIONAL | | | | | | | | | | | |
| 21 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 1 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | e-Kinerja | Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 22 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | 1 | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | e-Kinerja | Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 23 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 1 | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | e-Kinerja | Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Persentase |

F. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Guna mendukung capaian indikator kinerja utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi obyek Perjanjian Kinerja Tahun 2021 di atas, maka telah disusun beberapa program terkait berikut anggaran yang dibutuhkan

untuk merealisasikan kinerja tersebut sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021, sebagai berikut:

| No. | Program | Pagu Anggaran | Proporsi Anggaran |
|-----|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 120.972.705.179 | 18,67% |
| 2 | Program Penataan Bangunan Gedung | 314.193.204.484 | 48,48% |
| 3 | Program Penatagunaan Tanah | 1.427.281.700 | 0,22% |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 211.529.296.792 | 32,64% |
| | Jumlah Anggaran | 1.083.288.397.818 | 100% |

Pagu anggaran tersebut di atas hanya digunakan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang berbasis anggaran untuk mendukung capaian Rencana Strategis 2018-2022, antara lain:

1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana (Target 39%).
2. Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur, dengan indikator kinerja utama Persentase gedung pemda yang memenuhi standar (Target 58%).
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Target 91%).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan terhadap realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat terutama untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A.1. TARGET CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Terkait dengan target perjanjian kinerja organisasi pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta mempunyai Perjanjian Kinerja dengan beberapa indikator kinerja dengan target masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.1.
TARGET CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|--------------------------|---|---|--------|------------|
| SASARAN STRATEGIS | | | | |
| 1 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | 39% | Persentase |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|-----|---|---|--------|------------|
| 2 | Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur | Persentase gedung pemda yang memenuhi standar | 58% | Persentase |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | Persentase |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | 100% | Persentase |
| 5 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | 100% | Persentase |
| 6 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) | 100% | Persentase |
| 7 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|-----|--|---|--------|------------|
| | | Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) | | |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) | 100% | Persentase |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | 100% | Persentase |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | 100% | Persentase |
| 9 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) | 100% | Persentase |
| 10 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | 100% | Persentase |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | 100% | Persentase |
| 12 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|-----------------------|---|---|--------|------------|
| | | Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) | | |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) | 100% | Persentase |
| 13 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasasi DKI Jakarta (KSD Nomor 70) | 100% | Persentase |
| SASARAN KHUSUS | | | | |
| 14 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP | 100% | Persentase |
| 15 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP | 100% | Persentase |
| 16 | Meningkatkannya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | Persentase |
| 17 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan keuangan daerah | 3 | WTP |
| 18 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | Persentase |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan |
|----------------------------|---|---|--------|------------|
| 19 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | A (81) | Predikat |
| 20 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Nilai PMPRB Perangkat Daerah | 92 | Nilai |
| SASARAN OPERASIONAL | | | | |
| 21 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | Persentase |
| 22 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | Persentase |
| 23 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | Persentase |

A.2. REALISASI CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan target capaian Perjanjian Kinerja pada masing-masing IKU di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021:

Tabel 3.2.
REALISASI CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------|---|------------|--------|-----------|---------|
| SASARAN STRATEGIS | | | | | |
| 1 | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | Persentase | 39% | 28,01% | 128,18% |
| 2 | Persentase gedung pemda yang memenuhi standar | Persentase | 58% | 58,76% | 101,31% |
| 3 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 91% | 86,56% | 95,12% |
| 4 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | Persentase | 100% | 99,78% | 99,78% |
| 5 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) | Persentase | 100% | 98,50% | 98,50% |
| 7 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) | Persentase | 100% | 97,50% | 97,50% |

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|------------|--------|-----------|---------|
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) | Persentase | 100% | 97,50% | 97,50% |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | Persentase | 100% | 98,38% | 98,38% |
| 11 | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | Persentase | 100% | 100% | 100% |

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------|--|------------|---------|-----------|---------|
| 12 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta (KSD Nomor 70) | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| SASARAN KHUSUS | | | | | |
| 14 | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Persentase Pemanfaatan E-Order | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Opini laporan keuangan daerah | WTP | WTP (3) | WTP (3) | 100% |
| 18 | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | Predikat | A (81) | 90,55 | 111,79% |
| 20 | Nilai PMPRB Perangkat Daerah | Nilai | 92 | 84,57 | 91,92% |

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------------|---|------------|--------|-----------|----------------|
| SASARAN OPERASIONAL | | | | | |
| 21 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase | 100% | 83,34% | 83,34% |
| 22 | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase | 100% | 99,65% | 99,65% |
| 23 | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase | 100% | 99% | 99% |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | 100,07% |

Berdasarkan data di atas maka dapat dijabarkan realisasi masing-masing indikator kinerja, terdiri dari:

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana

Capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pada tahun 2021 adalah sebesar 128,18 %, dengan realisasi sebesar 28,01% dari target sebesar 39%, dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

| NO | WILAYAH | KECAMATAN | SESUAI | SESUAI JALAN | SESUAI SUNGAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI JALAN | TIDAK SESUAI SUNGAI | TOTAL |
|----|---------------|-------------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1 | JAKARTA BARAT | CENGKARENG | 49.98% | 7.93% | 4.46% | 21.41% | 14.29% | 1.93% | 100% |
| 2 | JAKARTA BARAT | GROGOL PETAMBURAN | 57.89% | 12.87% | 5.96% | 11.00% | 11.13% | 1.14% | 100% |
| 3 | JAKARTA BARAT | KALIDERES | 51.28% | 6.31% | 1.67% | 25.47% | 14.37% | 0.90% | 100% |
| 4 | JAKARTA BARAT | KEBON JERUK | 58.78% | 10.35% | 3.87% | 11.02% | 14.65% | 1.35% | 100% |
| 5 | JAKARTA BARAT | KEMBANGAN | 55.02% | 10.52% | 3.58% | 13.80% | 16.21% | 0.87% | 100% |
| 6 | JAKARTA BARAT | PALMERAH | 67.30% | 10.00% | 1.70% | 7.63% | 12.74% | 0.62% | 100% |
| 7 | JAKARTA BARAT | TAMANSARI | 43.75% | 10.66% | 4.09% | 24.09% | 16.66% | 0.75% | 100% |
| 8 | JAKARTA BARAT | TAMBORA | 46.09% | 8.27% | 7.51% | 20.70% | 16.90% | 0.54% | 100% |

| NO | WILAYAH | KECAMATAN | SESUAI | SESUAI JALAN | SESUAI SUNGAI | TIDAK SESUAI | TIDAK SESUAI JALAN | TIDAK SESUAI SUNGAI | TOTAL |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 9 | JAKARTA PUSAT | CEMPAKA PUTIH | 66.35% | 12.25% | 0.98% | 6.95% | 13.31% | 0.17% | 100% |
| 10 | JAKARTA PUSAT | GAMBIR | 59.30% | 11.60% | 5.30% | 9.70% | 13.50% | 0.60% | 100% |
| 11 | JAKARTA PUSAT | JOHAR BARU | 71.59% | 7.46% | 1.20% | 4.09% | 15.12% | 0.56% | 100% |
| 12 | JAKARTA PUSAT | KEMAYORAN | 65.17% | 9.82% | 1.81% | 7.39% | 15.35% | 0.46% | 100% |
| 13 | JAKARTA PUSAT | MENTENG | 64.24% | 9.86% | 5.35% | 7.95% | 11.81% | 0.77% | 100% |
| 14 | JAKARTA PUSAT | SAWAH BESAR | 59.32% | 10.09% | 3.08% | 9.25% | 17.37% | 0.89% | 100% |
| 15 | JAKARTA PUSAT | SEZEN | 62.37% | 9.42% | 6.00% | 8.09% | 13.51% | 0.61% | 100% |
| 16 | JAKARTA PUSAT | TANAH ABANG | 61.85% | 10.43% | 2.90% | 10.59% | 12.87% | 1.36% | 100% |
| 17 | JAKARTA SELATAN | CILANDAK | 69.64% | 6.86% | 1.93% | 8.88% | 11.52% | 1.16% | 100% |
| 18 | JAKARTA SELATAN | JAGAKARSA | 62.87% | 4.21% | 5.02% | 13.60% | 13.06% | 1.25% | 100% |
| 19 | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN BARU | 64.81% | 12.29% | 1.06% | 8.73% | 11.78% | 1.33% | 100% |
| 20 | JAKARTA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | 65.03% | 9.30% | 2.42% | 9.25% | 12.51% | 1.48% | 100% |
| 21 | JAKARTA SELATAN | MAMPANG | 69.89% | 6.61% | 1.67% | 9.14% | 11.05% | 1.66% | 100% |
| 22 | JAKARTA SELATAN | PANCORAN | 67.09% | 7.81% | 3.45% | 8.58% | 11.58% | 1.49% | 100% |
| 23 | JAKARTA SELATAN | PASAR MINGGU | 64.08% | 5.72% | 2.57% | 14.15% | 11.68% | 1.80% | 100% |
| 24 | JAKARTA SELATAN | PESANGGRAHAN | 59.81% | 8.62% | 3.70% | 10.25% | 16.20% | 1.42% | 100% |
| 25 | JAKARTA SELATAN | SETIABUDI | 64.91% | 11.30% | 2.74% | 8.18% | 12.31% | 0.56% | 100% |
| 26 | JAKARTA SELATAN | TEBET | 64.62% | 9.09% | 0.98% | 9.06% | 12.41% | 3.84% | 100% |
| 27 | JAKARTA TIMUR | CAKUNG | 57.53% | 5.29% | 2.28% | 15.88% | 17.13% | 1.89% | 100% |
| 28 | JAKARTA TIMUR | CIPAYUNG | 60.43% | 3.26% | 0.39% | 25.90% | 7.82% | 2.21% | 100% |
| 29 | JAKARTA TIMUR | CIRACAS | 56.68% | 5.02% | 1.23% | 22.48% | 12.80% | 1.80% | 100% |
| 30 | JAKARTA TIMUR | DUREN SAWIT | 61.06% | 8.50% | 2.54% | 11.36% | 15.29% | 1.24% | 100% |
| 31 | JAKARTA TIMUR | JATINEGARA | 61.11% | 8.49% | 3.21% | 9.51% | 15.28% | 2.40% | 100% |
| 32 | JAKARTA TIMUR | KERAMAT JATI | 68.19% | 2.92% | 3.14% | 12.89% | 11.23% | 1.63% | 100% |
| 33 | JAKARTA TIMUR | MAKASAR | 44.59% | 4.99% | 1.74% | 35.32% | 11.50% | 1.86% | 100% |
| 34 | JAKARTA TIMUR | MATRAMAN | 64.61% | 8.15% | 1.51% | 7.56% | 17.28% | 0.90% | 100% |
| 35 | JAKARTA TIMUR | PASAR REBO | 57.21% | 4.39% | 2.67% | 20.65% | 12.25% | 2.83% | 100% |
| 36 | JAKARTA TIMUR | PULOGADUNG | 61.92% | 9.73% | 1.04% | 13.23% | 12.78% | 1.20% | 100% |
| 37 | JAKARTA UTARA | CILINCING | 44.07% | 3.43% | 3.45% | 28.55% | 16.43% | 4.09% | 100% |
| 38 | JAKARTA UTARA | KELAPA GADING | 57.58% | 12.43% | 4.09% | 12.96% | 11.90% | 1.04% | 100% |
| 39 | JAKARTA UTARA | KOJA | 54.98% | 7.22% | 2.42% | 18.85% | 13.15% | 3.37% | 100% |
| 40 | JAKARTA UTARA | PADEMANGAN | 46.04% | 9.83% | 4.82% | 20.94% | 16.87% | 1.50% | 100% |
| 41 | JAKARTA UTARA | PENJARINGAN | 54.10% | 9.55% | 6.92% | 14.59% | 10.14% | 4.70% | 100% |
| 42 | JAKARTA UTARA | TANJUNG PRIOK | 57.54% | 9.60% | 3.81% | 13.95% | 12.08% | 3.02% | 100% |
| TOTAL | | | 60.73% | 8.34% | 2.91% | 13.16% | 13.53% | 1.32% | 100.00% |

| NO | KATEGORI | PERSENTASE | TOTAL |
|----|---------------------|------------|--------|
| 1 | SESUAI | 60.73% | 71.99% |
| 2 | SESUAI JALAN | 8.34% | |
| 3 | SESUAI SUNGAI | 2.91% | |
| 4 | TIDAK SESUAI | 13.16% | 28.01% |
| 5 | TIDAK SESUAI JALAN | 13.53% | |
| 6 | TIDAK SESUAI SUNGAI | 1.32% | |

Program berbasis anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penaatagunaan Tanah, dengan tingkat serapan anggaran masing-masing sebesar 95,25% dan 39.24%. Dengan tingkat serapan anggaran tersebut, tingginya serapan anggaran pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sudah tentu berpengaruh terhadap tingginya capaian indikator kinerja ini di tahun 2021. Sedangkan rendahnya serapan anggaran pada Program Penatagunaan Tanah tidak terlalu berpengaruh terhadap tingginya capaian indikator kinerja ini di tahun 2021.

Pencapaian target pada Indikator kinerja ini tidak semata mata dikarenakan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dianggarkan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan saja. Sekalipun dengan adanya kebijakan pengurangan anggaran serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat dampak dari pandemik covid-19, realisasi capaian target pada Indikator kinerja ini melebihi 100%. Hal ini dikarenakan kinerja program prioritas yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan juga bergantung pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan penataan ruang yang dibuat.

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, antara lain:

- a. Penataan ruang berfokus area yang masih terdapat tingkat ketidaksesuaian yang tinggi.
- b. Pengecekan kembali kegiatan pemanfaatan ruang di lapangan dengan web untuk disandingkan dengan rencana.

Disamping itu, terdapat pelaksanaan beberapa Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) KSD No. 17. Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (**Capaian 99,78%**)
- 2) KSD No. 22. Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (**Capaian 100%**)
- 3) KSD No. 23. Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (**Capaian 98,50%**)
- 4) KSD No. 28. Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (**Capaian 100%**)
- 5) KSD No. 30. Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (**Capaian 97,50%**)
- 6) KSD No. 31. Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (**Capaian 97,50%**)
- 7) KSD No. 53. Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (**Capaian 100%**)
- 8) KSD No. 70. Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta (**Capaian 100%**)
- 9) KSD No. 72. Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (**Capaian 100%**)
- 10) KSD No. 73. Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (**Capaian 100%**)

2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar

Capaian persentase gedung pemda yang memenuhi standar adalah sebesar 101,32%, dengan realisasi persentase gedung pemda yang memenuhi standar sebesar 58,76% dari target sebesar 58%. Berdasarkan hasil pendataan gedung tahun 2021, jumlah bangunan Gedung Pemda mencapai 9.847 massa bangunan gedung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.786 massa bangunan gedung di antaranya telah memenuhi standar karena dalam kondisi terawat sesuai kriteria yang telah ditetapkan, atau sebesar 58,76%. Sebagaimana halnya dengan indikator kinerja persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana di atas, capaian indikator kinerja ini juga tidak semata mata dikarenakan pelaksanaan Program dan Kegiatan

yang dianggarkan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan saja, melainkan juga bergantung pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan penataan ruang yang dibuat.

Program berbasis anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Penataan Bangunan Gedung, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 90,16%. Dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi tersebut, sudah tentu berpengaruh terhadap tingginya capaian indikator kinerja ini di tahun 2021.

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja persentase gedung pemda yang memenuhi standar ini adalah banyaknya pengelola bangunan gedung pemda yang melakukan perawatan gedung dan adanya pembangunan gedung baru yang memenuhi standar.

3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 95,12%, dengan realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 86,56% dari target sebesar 91%. Angka tersebut merupakan gabungan dari 3 (tiga) komponen yang dihitung, antara lain: komponen Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 36,34%, komponen Efisiensi sebesar 1,26% dan komponen Pencapaian Output sebesar 48,96%.

Program berbasis anggaran yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah semua program yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021, antar lain: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penatagunaan Tanah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan tingkat serapan anggaran masing-masing sebesar 95,25%, 90,16%, 39,24% dan 98,32%. Dengan rata-rata tingkat serapan anggaran yang tinggi tersebut, sudah tentu berpengaruh terhadap tingginya capaian indikator kinerja ini di tahun 2021. Tingkat serapan yang rendah pada Program Penatagunaan Tanah tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja ini mengingat porsi anggaran program tersebut hanya 0,22% dari total anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

Berikut ini beberapa faktor yang menghambat capaian indikator kinerja persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, antara lain:

- 1) Dari total 152 (seratus lima puluh dua) RSK dengan nilai total anggaran sebesar Rp648.122.488.155,00, terdapat 3 (tiga) Rincian Sub Kegiatan (RSK) dengan total nilai anggaran sebesar Rp869.408.100,00 yang tidak dilaksanakan.
- 2) Terdapat 30 (tiga puluh) RSK dengan total nilai anggaran sebesar Rp84.939.836.407,00 yang capaian realisasinya kurang dari 80%.

4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pelaksanaan Reform Perizinan Untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 17 adalah Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB). KSD ini turut mendukung capaian indikator kinerja persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu:

- a. Percepatan Pembangunan, dan
- b. Pergub tentang Prasarana Sarana Minimal

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) dengan capaian rata-rata sebesar 99,78%, berupa:

- 1) Penyusunan Pergub Insentif dan Disinsentif Pembangunan/Pemanfaatan Ruang
- 2) Pergub tentang Prasarana Sarana Minimal

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini, antara lain:

- Tersedianya Tenaga Ahli untuk penyusunan Pergub Insentif dan Disinsentif Pembangunan/Pemanfaatan Ruang
- Terlaksananya rapat yang diadakan seminggu sekali untuk memantau kemajuan penyusunan Pergub
- Kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan template peraturan yang berlaku

5. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 22 adalah Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal. KSD ini turut mendukung capaian indikator kinerja persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu Penyusunan Panduan Rancang Kota (UDGL) Kawasan Muara Angke. Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal dengan capaian rata-rata sebesar 100%, berupa:

- 1) Finalisasi Panduan Rancang Kota (UDGL) Kawasan Muara Angke
- 2) Penetapan Peraturan Gubernur Panduan Rancang Kota (UDGL) Kawasan Muara Angke

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini adalah telah ditetapkan Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2021 tentang Panduan Rancang Kota (UDGL) Kawasan Muara Angke.

6. Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 23 adalah Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai. KSD ini turut mendukung capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai dan Perpanjangan Penlok/Penerbitan Penlok Baru.

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai dengan capaian rata-rata sebesar 98,50%, berupa:

- 1) Pendataan bangunan yang memiliki kewajiban sarana pengendalian air hujan di 5 wilayah DKI Jakarta sejumlah 200 lokasi

- 2) Terlaksananya survei pendataan bangunan sesuai daftar B03 yang memiliki kewajiban sarana pengendalian banjir
- 3) Terlaksananya penerapan sarana pengelolaan air hujan pada bangunan sesuai daftar B03 sejumlah 80%.
- 4) Terbitnya perpanjangan penlok dan penlok baru.
Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator KSD ini, antara lain:
 - Kerjasama yang baik dari pemilik/pengelola bangunan
 - Ketaatan pemilik/pengelola bangunan akan peraturan sudah baik.

7.1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 28 adalah Pengembangan Transit Oriented Development (TOD). KSD ini turut mendukung capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu:

- a. Monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan TOD
- b. Penyempurnaan Pergub tentang Pedoman UDGL
- c. Penetapan PRK Kawasan TOD Bundaran HI
- d. Penetapan PRK Kawasan TOD Fase 2 Glodok – Kota
- e. Penetapan PRK Kawasan TOD Pulomas
- f. Penetapan PRK Kawasan TOD Pegangsaan Dua

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dengan capaian rata-rata sebesar 100%, berupa:

- 1) Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan TOD
- 2) Laporan koordinasi Penyempurnaan Pergub tentang Pedoman UDGL
- 3) Draft Revisi Pergub Pedoman Penyusunan Panduan Rancang Kota

- 4) Draft Pergub PRK Kawasan TOD Bunderan HI
- 5) Draft Pergub PRK Kawasan TOD Glodok – Kota
- 6) Draft Pergub tentang PRK Kawasan Berorientasi Transit Pulomas
- 7) Draft Pergub tentang PRK Kawasan Berorientasi Transit Pegangsaan Dua.

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini, antara lain:

- Tersedianya Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan TOD
- Tersedianya Laporan Koordinasi Penyempurnaan Pergub tentang Pedoman UDGL
- Tersedianya laporan terkait penyampaian Tindak Lanjut Progress UDGL Pulomas dan Pegangsaan Dua
- Tersedianya laporan terkait penyampaian Tindak Lanjut Progress UDGL TOD Glodok Kota dan Bunderan HI beserta draft UDGL nya

7.2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 30 adalah Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT). KSD ini ini turut mendukung capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu:

- a. Perpanjangan Penetapan Lokasi MRT Fase 2A (Bunderan HI- Kota)
- b. Penetapan Lokasi Kota - Ancol Barat MRT Jakarta Fase 2B

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) dengan capaian sebesar 97,50%, berupa:

- 1) Penerbitan Kepgub Perpanjangan Penetapan Lokasi MRT Fase 2A (Bunderan HI-Kota)
- 2) Penerbitan Kepgub Penetapan Lokasi Kota - Ancol Barat MRT Jakarta Fase 2B.

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini adalah efektifnya pelaksanaan koordinasi dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan template peraturan yang berlaku.

7.3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 31 adalah Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT). KSD ini turut mendukung capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu:

- a. Penetapan lokasi untuk pembangunan LRT Jakarta koridor 1 Fase 2A
- b. Penetapan lokasi untuk pembangunan LRT Jakarta koridor 1 Fase 2B

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) dengan capaian sebesar 97,50%, berupa:

- 1) Persetujuan trase dari Kementerian Perhubungan
- 2) Penyampaian perbal Kepgub tentang Penetapan Lokasi Fase 2A
- 3) Penyampaian perbal Kepgub tentang Penetapan Lokasi Fase 2B.

Sebagaimana KSD sebelumnya, faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini adalah efektifnya pelaksanaan koordinasi dan terpenuhinya kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan template peraturan yang berlaku.

7.4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 73 adalah Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian. KSD ini turut mendukung capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi

pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu Kajian Terhadap Adanya TPZ Kode F di Kawasan Jalan Cipete Raya. Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian dengan capaian rata-rata sebesar 100%, berupa terselesaikannya Kajian terhadap adanya TPZ kode F di kawasan Jalan Cipete raya.

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini adalah efektifnya pelaksanaan koordinasi dan terpenuhinya kelengkapan dokumen pendukung.

8.1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 39 adalah Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA. KSD ini tidak mendukung capaian indikator kinerja berbasis program Renstra. Realisasi KSD ini berupa pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu:

- a. Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.
- b. Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- c. Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA dengan capaian sebesar 100%, berupa:

- 1) Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020
- 2) Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional Triwulan IV Tahun 2020
- 3) Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I, II dan III Tahun 2021
- 4) Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional Triwulan I, II dan III Tahun 2021

- 5) Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
- 6) Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020
- 7) Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 pada aplikasi esr.menpan.go.id (akhir Januari 2021)
- 8) Ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021
- 9) Laporan Rekapitulasi Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021
- 10) Disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini adalah efektifnya pengumpulan data pendukung dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja DCKTRP, Dokumen Kinerja Eselon 2,3,4 dan Fungsional dan Draft Evaluasi Renstra, LKIP dan dokumen lain yang menjadi pendukung capaian indikator kinerja ini.

8.2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 61 adalah Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan. KSD ini tidak mendukung capaian indikator kinerja berbasis program Renstra. Realisasi KSD ini berupa pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021. Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dengan capaian sebesar 100%, berupa terselesaikannya 80%-85% TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021.

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini adalah efektifnya pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan kesesuaian hasil pelaksanaan tindak lanjut dengan rekomendasi yang termuat dalam LHP APIP.

9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 44 adalah Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan. KSD ini tidak mendukung capaian indikator kinerja berbasis program Renstra. Realisasi KSD ini berupa pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu Penyediaan master data pohon dengan metode deep learning. Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau dengan capaian sebesar 100%, berupa pelaksanaan simulasi pelaksanaan deep learning di sistem jakartasatu dan laporan evaluasi pelaksanaan pendataan pohon dengan metode deep learning.

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator KSD ini, antara lain

- Efektifitas Kerjasama Tim
- Update knowledge Sistem GIS khususnya Deep Learning
- Tersedianya lisensi GIS
- Koordinasi yang baik dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam memberikan data dasar pohon yang dijadikan materi untuk data learning

10. Capaian Indikator Kinerja Persentase Renyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 45 adalah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat. KSD ini tidak mendukung capaian indikator kinerja berbasis program Renstra. Realisasi KSD ini berupa pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu:

- a. Penyusunan Kajian Usulan Penambahan Kampung pada Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018
- b. Penerbitan Surat Keterangan Selesai Membangun untuk Rumah Susun Kampung Akuarium Tahap I

- c. Perizinan Pembangunan Rumah Susun yang baru Terbangun
- d. Penanganan urusan kepemilikan lahan dan tata ruang dalam rangka penataan Kampung Akuarium, Kunir, Lodan, Tongkol, dan Krapu
- e. Penyusunan Naskah Akademik 14 Kampung yaitu Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Empang, Kampung Baru, Kampung Tembok Bolong, Kampung Muka, Kampung Marlina, Kampung Elektro, Kampung Gedong Pompa, Kampung Tanah Merah, Kampung Kali Apuran, Kampung Guji Baru, Kampung Rawa Barat, Kampung Rawa Timur, dan Kampung Sekretaris
- f. Pemetaan kebutuhan pemanfaatan aset milik non Pemprov DKI Jakarta
- g. Penyesuaian Peta Operasional Tata Ruang untuk rumah susun bagi warga Eks Kampung Kunir
- h. Pembuatan peta sebaran lokasi pelaksanaan KSBB permukiman
- i. Kajian Tata Ruang Penyesuaian Zonasi di Tanah Merah menjadi Kuning

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat dengan capaian sebesar 98,38%, berupa:

- 1) terselesaikannya hasil kajian penambahan lokasi penataan kampung dan masyarakat oleh tim penggerak GTRA
- 2) Terbitnya Surat Keterangan Selesai Membangun untuk Rumah Susun Kampung Akuarium Tahap I
- 3) Terbitnya Surat Keterangan Selesai Membangun untuk Rumah Susun yang baru Terbangun
- 4) Paparan hasil Kajian GTRA untuk 5 (lima) Lokasi Kampung oleh Tim Penggerak GTRA di hadapan Asisten Pembangunan dan LH
- 5) Paparan hasil Kajian GTRA untuk 5 (lima) Lokasi Kampung serta penetapan opsi lokasi Kampung Kunir dan Kampung Walang oleh Ketua Harian GTRA di hadapan Gubernur DKI Jakarta
- 6) Tersosialisasikannya Surat Gubernur Terkait Reforma Agraria di Kampung Prioritas kepada masyarakat
- 7) Terkirimnya Surat Gubernur Terkait Reforma Agraria di Kampung kepada Menteri ATR
- 8) Terselesaikannya Naskah Akademis 14 Kampung yaitu Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Empang, Kampung Baru, Kampung Tembok Bolong, Kampung Muka, Kampung Marlina, Kampung Elektro, Kampung Gedong Pompa, Kampung

Tanah Merah, Kampung Kali Apuran, Kampung Guji Baru, Kampung Rawa Barat, Kampung Rawa Timur, dan Kampung Sekretaris

- 9) terselesaikannya penyelesaian tata ruang di 14 Kampung sesuai dengan rekomendasi Naskah Akademis
- 10) Penyampaian overlay data persil dengan rencana CAP yang telah disusun oleh DCKTRP kepada Biro KSD
- 11) Kajian Tata Ruang - Penyesuaian Peta Operasional Tata Ruang
- 12) Tersedianya peta persebaran lokasi KSBB permukiman
- 13) Kajian Tata Ruang terkait Penyesuaian Zonasi/Kegiatan

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini, antara lain:

- Data deliniasi area Kampung Akuarium, Kunir, Lodan, Tongkol, dan Krapu untuk penyusunan laporan penanganan urusan tata ruang lengkap
- Untuk rancangan SK Gub Subjek Reforma Agraria kepada Koperasi Tongkol, Krapu, Lodan sudah tersedia drafnya dari akhir tahun sehingga tinggal menunggu proses berjalan hingga ke tahap perbal berjalan;
- Terkait surat keterangan selesai membangun target waktunya tersebut telah disesuaikan dengan target penyelesaian pembangunan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

11. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 63 adalah Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). KSD ini tidak mendukung capaian indikator kinerja berbasis program Renstra. Realisasi KSD ini berupa pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan.

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan capaian sebesar 100%, berupa:

- a. Tersampainya data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital
- b. Tersampainya data hasil kuisisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta. Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini, antara lain:
 - Kerjasama dan Tim yang baik dalam membangun konsep SPBE untuk Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 - Arahan dan pendampingan yang baik dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selamat penyelesaian konsep SPBE.

12.1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 53 adalah Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi. KSD ini turut mendukung capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait yaitu:

- a. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang PRK Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju
- b. Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan pada Kawasan Pantai Kita Maju Bersama
- c. Finalisasi Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta dalam Peraturan Gubernur tentang RDTR
- d. Penyiapan peta PSU dan lahan kontribusi di Kawasan Pantai

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi dengan capaian rata-rata sebesar 100%, berupa:

- 1) Proses Perbal Rapergub PRK Pantai Kita Maju

- 2) Laporan hasil pengawasan terhadap kesesuaian atas izin yang diterbitkan
- 3) Laporan hasil pengawasan terhadap kesesuaian atas izin yang diterbitkan
- 4) Persetujuan KLHS, Validasi peta dari BIG, Persetujuan substantif dan Penyelesaian Peraturan Gubernur tentang RDTR
- 5) Peta PSU dan lahan kontribusi di Kawasan Pantai.

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini, antara lain:

- Data eksisting kawasan Pesisir Teluk Jakarta tersedia.
- Tersedianya Tenaga Ahli SIG dan pendukung pada penyusunan peta Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta dalam Peraturan Gubernur tentang RDTR
- Pengerjaan peta berbasis web GIS memudahkan koordinasi.

12.2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 72 adalah Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim. KSD ini turut mendukung capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu

- a. Melakukan identifikasi dan pemantauan penerapan prinsip bangunan gedung hijau terhadap bangunan eksisting
- b. Mendorong percepatan penyusunan regulasi tentang penetapan mekanisme insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan kepulauan seribu terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana iklim.

Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim dengan capaian rata-rata sebesar 100%, berupa:

- 1) Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan penerapan prinsip bangunan gedung hijau terhadap bangunan eksisting
- 2) Tersedianya laporan hasil identifikasi dan pemantauan penerapan prinsip bangunan gedung hijau terhadap bangunan eksisting.
- 3) Penyusunan Pergub Insentif dan Disinsentif Pembangunan/Pemanfaatan Ruang.

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini adalah Pemilik/pengelola bangunan memberikan data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan Bangunan Gedung Hijau secara kooperatif.

13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (KSD Nomor 70)

Kegiatan Strategis Daerah Nomor 70 adalah Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta. KSD ini turut mendukung capaian persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana tercermin dari adanya realisasi pelaksanaan rencana aksi terkait, yaitu Perencanaan Penataan Kawasan Monas. Sedangkan indikator kinerja pada KSD ini adalah persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta dengan capaian rata-rata sebesar 100%, berupa tersedianya Laporan koordinasi penataan Kawasan Monas dan Laporan rekomendasi pendanaan penataan Kawasan Monas.

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja KSD ini, antara lain:

- Adanya koordinasi antara SKPD terkait dalam mewujudkan rencana penataan monas (bagian dari kawasan medan merdeka) dalam bentuk rencana penataan hasil sayembara
- Terdapat besaran investasi yang telah dilakukan pada kawasan plaza selatan yg menjadi baseline value investasi dan besaran perkiraan besaran investasi baik landscape, interior dan content development.
- Adanya peran para pihak, para pemenang sayembara, TGUPP DKI Jakarta, Ahli Museum, Ahli Pengembangan Konten dan Pemerhati Sejarah Jakarta yang memberikan ide dan gagasan baik untuk landscaping, interior dan content development kawasan Medan Merdeka.

14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi Teknis Terkait Bangunan Gedung Pemda Yang Tepat Waktu Sesuai SOP

Capaian penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda selama tahun 2021 adalah sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh jumlah permohonan masuk yang sudah lengkap dapat diselesaikan rekomendasi teknisnya secara tepat waktu sesuai SOP. Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Proses koordinasi dengan SKPD/UKPD Pemohon berjalan baik dan lancar dan rata-rata permohonan yang disampaikan sudah lengkap dokumennya.

15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi Teknis Terkait Trase Yang Tepat Waktu Sesuai SOP

Capaian penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase selama tahun 2021 adalah sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh jumlah permohonan masuk yang sudah lengkap dapat diselesaikan rekomendasi teknisnya secara tepat waktu sesuai SOP. Hal ini disebabkan efektifnya tupoksi penataan struktur ruang sesuai SOP terkait.

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah adanya dokumen teknis untuk rencana pembangunan / Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (untuk permohonan Peta Penetapan Lokasi) yang lengkap sesuai ketentuan dan Dokumen Kajian Awal (untuk permohonan Peta Informasi Rencana Kota) dari instansi yang memerlukan tanah.

16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan e-Order

Capaian pemanfaatan e-Order selama tahun 2021 adalah sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh jumlah rupiah realisasi belanja makanan dan minuman yang memanfaatkan e-Order telah memenuhi target yang ditetapkan dari total anggaran belanja makanan dan minuman. Hal ini disebabkan efektifnya tupoksi penataan struktur ruang sesuai SOP terkait.

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah meningkatnya kesadaran akan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja makanan dan minuman rapat melalui Sistem e-Order.

17. Capaian Indikator Kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah

Capaian Opini laporan keuangan daerah tahun 2020 adalah 100%, dengan realisasi sesuai dengan target Predikat 3 (WTP), yang berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta secara tepat waktu dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah efektifnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset serta sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum dan efektifnya pelaksanaan rekonsiliasi yang menjamin penyusunan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

18. Capaian Indikator Kinerja Persentase implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program-Program Umum dan Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Capaian Implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dicapai sebesar 100%, yang berarti bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan keempat hal berikut:

- a) menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan
- b) menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan
- c) menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan, dan
- d) mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan)

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja ini, antara lain:

- Efektifitas Kerjasama Tim
- Konsistensi dalam mengimplementasikan timeline Strategi Komunikasi Publik

- Update knowledge Sistem Informasi Geospasial sebagai landasan Strakom dengan tema : Menuju Smart City dengan Geospasial Jakarta Satu.

19. Capaian Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021

Capaian Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebesar 111,79%, dengan realisasi predikat SAKIP sebesar 90,55% dari target sebesar 81%, yang berarti bahwa Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat telah memenuhi target yang ditetapkan.

Faktor utama yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tupoksi dan perencanaan, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja.

20. Capaian Indikator Kinerja Nilai PMPRB Perangkat Daerah

Capaian Nilai PMPRB Perangkat Daerah adalah 91,92%, dengan realisasi nilai sebesar 84,57% dari target 92%, yang berarti bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB telah menggunakan model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management yang diterapkan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Faktor utama yang menghambat capaian indikator kinerja ini adalah Jumlah SDM yang terbatas (hanya 64% dari analisa beban kerja), menyebabkan pelayanan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja tidak dapat berjalan secara optimal.

21. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur adalah sebesar 83,34% dari target sebesar 100%, yang berarti bahwa jumlah realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) masih menyisakan arahan Gubernur yang akan ditindaklanjuti di tahun berikutnya.

Salah satu faktor yang menghambat capaian kinerja ini adalah aplikasi e-office belum digunakan secara optimal dalam sistem pelaporan tugas yang diberikan pimpinan kepada level di bawahnya.

22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah sebesar 99,65% dari target sebesar 100%, yang berarti bahwa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebanyak 4.243 pengaduan dari 4.358 pengaduan melalui CRM. Hal ini disebabkan penggunaan CRM sebagai media penyampaian pengaduan sudah berjalan secara optimal.

Berikut ini beberapa faktor yang mendukung capaian indikator kinerja ini, antara lain:

- Sarana dan prasarana yang baik dan faktor sumber daya manusia yang ideal sangat berperan untuk menjawab dan mengelola pengaduan yang masuk.
- Aplikasi CRM Versi 2.0 atau versi terbaru yang dilengkapi berbagai fitur yang dapat memudahkan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan tindak lanjut pengaduan.

23. Capaian Indikator Kinerja Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)

Capaian progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah sebesar 99% dari target 100%, yang berarti bahwa upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI telah dilaksanakan dengan sangat baik. Faktor yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah penentuan rencana aksi pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara memadai sehingga temua dapat diselesaikan sesuai rekomendasi BPK RI serta pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi berjalan dengan efektif.

A.3. PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Capaian Indikator kinerja Utama Tahun 2021 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (Renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018-2021. Secara umum capaian kinerja rata-rata Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta atas Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100,07%, sedangkan capaian kinerja rata-rata tahun 2020, 2019 dan 2018 secara berurut masing-masing sebesar 99,84%, 118,29% dan 118,33%. Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU
TAHUN 2018-2021

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2018 | | |
|--------------------------|---|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| SASARAN STRATEGIS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | 39% | 28,01% | 128,18% | 40% | 28,38% | 129,05% | 41% | 28,73% | 129,92% | 42% | 29% | 130,95% |
| 2 | Persentase gedung pemda yang memenuhi standar | 58% | 58,76% | 101,31% | 56% | 58,65% | 104,73% | 54% | 57,60% | 106,67% | 52% | 55% | 105,70% |
| 3 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 91% | 86,56% | 95,12% | 100% | 90,16% | 90,16% | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | 100% | 99,78% | 99,78% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2018 | | |
|----|---|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 5 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) | 100% | 98,50% | 98,50% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) | 100% | 100% | 100% | 100% | 97,50% | 97,50% | - | - | - | - | - | - |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) | 100% | 97,50% | 97,50% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) | 100% | 97,50% | 97,50% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2018 | | |
|----|--|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 8 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | 100% | 98,38% | 98,38% | 100% | 91,94% | 91,94% | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2018 | | |
|-----------------------|---|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta (KSD Nomor 70) | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | - | - | - | - | - | - |
| SASARAN KHUSUS | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Opini laporan keuangan daerah | WTP (3) | WTP (3) | 100% | WTP (3) | WTP (3) | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | A (81) | 90,55 | 111,79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nilai PMPRB Perangkat Daerah | 92 | 84,57 | 91,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2019 | | | Tahun 2018 | | |
|----------------------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| SASARAN OPERASIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 100% | 83,34% | 83,34% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 100% | 99,65% | 99,65% | 100% | 98,15% | 98,15% | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | | | | 100,07% | | | 99,84% | | | 118,29% | | | 118,33% |

Berikut ini penjelasan terkait kenaikan atau penurunan pada masing-masing capaian indikator kinerja:

1. Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana (**Capaian 128,18%**)

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan kinerja pada capaian indikator kinerja Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 0,87%, dari capaian sebesar 129,05% (tahun 2020) menjadi sebesar 128,18% (tahun 2021). Penurunan capaian disebabkan kenaikan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 0,37% (Tahun 2020 (28,38%)/Tahun 2021 (28,01%)) masih lebih rendah dari kenaikan targetnya sebesar 1% (Tahun 2020 (40%)/Tahun 2021 (39%)). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian melebihi 100%, langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menurunkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian tersebut masih cukup baik dan dapat ditingkatkan kinerja di tahun berikutnya melalui implementasi intensif kebijakan penataan ruang yang meliputi penerapan Peraturan Zonasi dalam pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang di lapangan.

Dari tabel tersebut di atas juga terlihat trend realisasi persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana yang menurun sekitar 0,3% per tahun meskipun capaian kinerjanya relatif sama setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan efektifitas upaya yang dilaksanakan bersifat konstan dan masih diperlukan upaya-upaya lain untuk membuat trendnya menjadi meningkat.

2. Persentase gedung pemda yang memenuhi standar (**Capaian 101,31%**)

Realisasi indikator kinerja Persentase gedung pemda yang memenuhi standar pada tahun 2021 sebesar 58,76 % sedikit lebih besar dari target yang ditetapkan yakni 58% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,31%. Namun jika dibandingkan capaiannya di tahun 2020, terjadi penurunan kinerja sebesar 3,42%, dari capaian sebesar 104,73% (tahun 2020) menjadi sebesar 101,31% (tahun 2021). Penurunan capaian disebabkan kenaikan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 0,11% (Tahun 2020 (58,65%)/Tahun 2021 (58,76%)) masih lebih rendah dari kenaikan targetnya sebesar 2% (Tahun 2020 (56%)/Tahun 2021 (58%)). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian melebihi 100%, langkah-langkah yang dilaksanakan untuk meningkatkan persentase gedung pemda yang memenuhi standar mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian tersebut masih cukup baik dan dapat ditingkatkan kinerja di tahun berikutnya melalui optimalisasi pendataan dan pemutakhiran data bangunan Gedung Pemda.

3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (**Capaian 95,12%**)

Capaian indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mengalami kenaikan sebesar 4,96%, yaitu dari capaian sebesar 90,16% pada tahun 2020 menjadi sebesar 95,12% pada tahun 2021. Pada tahun 2020, realisasi indikator kinerja ini sebesar 90,16%, yang terdiri dari komponen realisasi penyerapan anggaran sebesar 40%, komponen efisiensi sebesar 0,83% dan komponen capaian output sebesar 49,33%. Sedangkan pada tahun 2021, realisasi indikator kinerja ini sebesar 86,56%, yang terdiri dari komponen realisasi penyerapan anggaran sebesar 36,33%, komponen efisiensi sebesar 1,26% dan komponen capaian output sebesar 48,96%. Meningkatnya capaian indikator kinerja persentase capaian kualitas anggaran pada tahun 2021,

meskipun realisasi indikator kinerja mengalami penurunan, disebabkan penurunan target capaian dari 100% pada tahun 2020 menjadi 91% pada tahun 2021.

4. Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) **(Capaian 99,78%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) mengalami penurunan sebesar 0,22%, yaitu dari capaian sebesar 100% pada tahun 2020 menjadi sebesar 97,78% pada tahun 2021. Penurunan bersifat tidak signifikan yang disebabkan kurang sempurnanya nilai pelaksanaan rencana aksi KSD ini di triwulan 1 tahun 2021.

5. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Kenaikan atau penurunan tidak dapat diukur karena belum ada KSD ini di tahun 2020.

6. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) **(Capaian 98,50%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai mengalami penurunan sebesar 1,50%, yaitu dari capaian sebesar 100% pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,50% pada tahun 2021. Penurunan bersifat tidak signifikan yang disebabkan kurang sempurnanya nilai pelaksanaan rencana aksi KSD ini di triwulan 2 tahun 2021.

7.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD 28) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) mengalami kenaikan sebesar 2,50%, yaitu dari capaian sebesar 97,50% pada tahun 2020 menjadi sebesar 100% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan rencana aksi KSD tahun 2021.

7.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) **(Capaian 97,50%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) mengalami penurunan sebesar 2,50%, yaitu dari capaian sebesar 100% pada tahun 2020 menjadi sebesar 97,50% pada tahun 2021. Penurunan bersifat tidak signifikan yang disebabkan kurang sempurnanya nilai pelaksanaan rencana aksi KSD ini di triwulan 1 tahun 2021.

7.3. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) **(Capaian 97,50%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) mengalami penurunan sebesar 2,50%, yaitu dari capaian sebesar 100% pada tahun 2020 menjadi sebesar 97,50% pada tahun 2021. Penurunan bersifat tidak signifikan yang disebabkan kurang sempurnanya nilai pelaksanaan rencana aksi KSD ini di triwulan 3 tahun 2021.

7.4. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian mengalami kenaikan sebesar 10%, yaitu dari capaian sebesar 90% pada tahun 2020 menjadi sebesar 100% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan rencana aksi KSD tahun 2021.

8.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA dapat dipertahankan kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua rencana aksi KSD ini pada tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal.

8.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dapat dipertahankan kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua rencana aksi KSD ini pada tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal.

9. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Kenaikan atau penurunan tidak dapat diukur karena belum ada KSD ini di tahun 2020.

10. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) **(Capaian 98,38%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 6,44%, yaitu dari capaian sebesar 91,94% pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,38% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan rencana aksi KSD tahun 2021.

11. Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dapat dipertahankan kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua rencana aksi KSD ini pada tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal.

12.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD 53) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi dapat dipertahankan kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua rencana aksi KSD ini pada tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal.

12.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Kenaikan atau penurunan tidak dapat diukur karena belum ada KSD ini di tahun 2020.

13. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (KSD Nomor 70) **(Capaian 100%)**

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 5%, yaitu dari capaian sebesar 95% pada tahun 2020 menjadi sebesar 100% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan rencana aksi KSD tahun 2021.

14. Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda tepat waktu sesuai SOP (**Capaian 100%**)

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda tepat waktu sesuai SOP dapat dipertahankan kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua rencana aksi KSD ini pada tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal.

15. Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP (**Capaian 100%**)

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP dapat dipertahankan kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua rencana aksi KSD ini pada tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal.

16. Persentase Pemanfaatan E-Order (**Capaian 100%**)

Capaian indikator kinerja Persentase Pemanfaatan E-Order pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Kenaikan atau penurunan tidak dapat diukur karena belum ada KSD ini di tahun 2020.

17. Opini laporan keuangan daerah (**Capaian 100%**)

Capaian indikator kinerja Opini laporan keuangan daerah dapat dipertahankan kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua rencana aksi KSD ini pada tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal.

18. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (**Capaian 100%**)

Capaian indikator kinerja Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dipertahankan kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semua rencana aksi KSD ini pada tahun 2021 dapat dilaksanakan secara optimal.

19. Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 (**Capaian 111,79%**)

Capaian indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebesar 111,79%. Kenaikan atau penurunan tidak dapat diukur karena belum ada KSD ini di tahun 2020.

20. Nilai PMPRB Perangkat Daerah (**Capaian 91,92%**)

Capaian indikator kinerja Nilai PMPRB Perangkat Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar 91,92%. Kenaikan atau penurunan tidak dapat diukur karena belum ada KSD ini di tahun 2020.

21. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (**Capaian 83,34%**)

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur mengalami penurunan sebesar 16,66%, yaitu dari capaian sebesar 100% pada tahun 2020 menjadi sebesar 83,34% pada tahun 2021. Penurunan cukup signifikan yang disebabkan tidak sempurnanya nilai pelaksanaan rencana aksi KSD ini di triwulan 4 tahun 2021.

22. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (**Capaian 99,65%**)

Capaian indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1,50%, yaitu dari capaian sebesar 98,15% pada tahun 2020 menjadi sebesar 99,65% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan rencana aksi KSD tahun 2021.

23. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) (**Capaian 99%)**

Capaian indikator kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) mengalami penurunan sebesar 1%, yaitu dari capaian sebesar 100% pada tahun 2020 menjadi sebesar 99% pada tahun 2021. Penurunan bersifat tidak signifikan yang disebabkan kurang sempurnanya nilai pelaksanaan rencana aksi KSD ini di triwulan 2 tahun 2021.

A.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Secara umum, Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan yang tercermin dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja.

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2021 pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
TAHUN 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|--------------------------|--|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| SASARAN STRATEGIS | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | 128,18% | 94,59% | 33,59% |
| 2 | Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur | Persentase gedung pemda yang memenuhi standar | 101,31% | 90,16% | 11,15% |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95,12% | 93,66% | 1,46% |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | 99,78% | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|-----|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | 100,00% | - | - |
| 6 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) | 98,50% | - | - |
| 7 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) | 100,00% | - | - |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) | 97,50% | - | - |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) | 97,50% | - | - |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) | 100,00% | - | - |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | 100,00% | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|-----|--|--|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | 100,00% | - | - |
| 9 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) | 100,00% | - | - |
| 10 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | 98,38% | - | - |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | 100,00% | - | - |
| 12 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) | 100,00% | - | - |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) | 100,00% | - | - |
| 13 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (KSD Nomor 70) | 100,00% | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|----------------------------|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| SASARAN KHUSUS | | | | | |
| 14 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP | 100,00% | - | - |
| 15 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP | 100,00% | - | - |
| 16 | Meningkatkannya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | 100,00% | - | - |
| 17 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini laporan keuangan daerah | 100,00% | - | - |
| 18 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | 100,00% | - | - |
| 19 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | 111,79% | - | - |
| 20 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Nilai PMPRB Perangkat Daerah | 91,92% | - | - |
| SASARAN OPERASIONAL | | | | | |
| 21 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 83,34% | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|--------------------------|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 22 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | 99,65% | - | - |
| 23 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 99,00% | - | - |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | 100,07% | 93,66% | 6,41% |

Tinggi rendahnya tingkat efisiensi dapat menunjukkan besar kecilnya pengaruh penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja. Semakin tinggi tingkat efisiensi menunjukkan semakin kecil pengaruh penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja. Demikian sebaliknya, semakin rendah tingkat efisiensi menunjukkan semakin besar pengaruh penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja.

1. Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana (**Tingkat Efisiensi 33,59%**)

Tingginya tingkat efisiensi pada indikator kinerja utama ini diperoleh dari selisih capaian indikator kinerja Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penatagunaan Tanah. Pada tingkat efisiensi tersebut, capaian realisasi anggaran pada kedua program ini sebesar 94,59% mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18%. Ini menunjukkan kedua program tersebut berhasil mendorong terjadinya penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana secara efisien, selain juga didukung oleh pelaksanaan tupoksi rutin.

2. Persentase gedung pemda yang memenuhi standar (**Tingkat Efisiensi 11,15%**)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja utama ini diperoleh dari selisih capaian indikator kinerja Persentase gedung pemda yang memenuhi standar dengan tingkat capaian realisasi anggaran pada Program Penataan Bangunan Gedung. Pada tingkat efisiensi tersebut, capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar 90,16% mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase gedung pemda yang memenuhi standar sebesar 101,31%. Ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil mendorong terrealisasinya gedung pemda yang memenuhi standar secara efisien, selain juga didukung oleh pelaksanaan tupoksi rutin.

3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (**Tingkat Efisiensi 1,46%**)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja utama ini diperoleh dari selisih capaian indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan tingkat capaian realisasi anggaran pada seluruh program pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Penyerapan Anggaran 95,25%)
- b. Program Penataan Bangunan Gedung (Penyerapan Anggaran 90,16%)
- c. Program Penatagunaan Tanah (Penyerapan Anggaran 39,24%)
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Penyerapan Anggaran 98,32%)

Pada tingkat efisiensi tersebut, capaian realisasi anggaran secara gabungan dari keempat program tersebut sebesar 93,66% mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,12%. Ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini sangat bergantung pada capaian penyerapan anggaran.

4. Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) (**Tingkat Efisiensi -**)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 99,78% turut mendukung

capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

5. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) **(Tingkat Efisiensi -)**

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

6. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) **(Tingkat Efisiensi -)**

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 98,50% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase gedung pemda yang memenuhi standar 101,31% dengan tingkat efisiensi sebesar 11,15% dan Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

7.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD 28) **(Tingkat Efisiensi -)**

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD in sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

7.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) (**Tingkat Efisiensi -**)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 97,50% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

7.3. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) (**Tingkat Efisiensi -**)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 97,50% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

7.4. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) (**Tingkat Efisiensi -**)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

8.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) (**Tingkat Efisiensi -**)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

8.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) (***Tingkat Efisiensi -)***

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

9. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) (***Tingkat Efisiensi -)***

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

10. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) (***Tingkat Efisiensi -)***

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 98,38% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

11. Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) (***Tingkat Efisiensi -)***

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

12.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD 53) **(Tingkat Efisiensi -)**

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

12.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) **(Tingkat Efisiensi -)**

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase gedung pemda yang memenuhi standar 101,31% dengan tingkat efisiensi sebesar 11,15% dan Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

13. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasinya DKI Jakarta (KSD Nomor 70) **(Tingkat Efisiensi -)**

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan tingkat efisiensi sebesar 33,59%.

14. Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda tepat waktu sesuai SOP (***Tingkat Efisiensi -***)
Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.
 15. Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP (***Tingkat Efisiensi -***)
Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.
 16. Persentase Pemanfaatan E-Order (***Tingkat Efisiensi -***)
Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.
 17. Opini laporan keuangan daerah (***Tingkat Efisiensi -***)
Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.
 18. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (***Tingkat Efisiensi -***)
-

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

19. Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 (***Tingkat Efisiensi -***)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 111,79% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

20. Nilai PMPRB Perangkat Daerah (***Tingkat Efisiensi -***)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 91,92% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

21. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (***Tingkat Efisiensi -***)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 83,34% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

22. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (***Tingkat Efisiensi -***)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 99,65% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

23. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) (**Tingkat Efisiensi -**)

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja ini tidak dapat diukur karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 99% dan tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi.

Sebagai kesimpulan, tingkat efisiensi hanya dapat diukur pada indikator kinerja yang capaiannya didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran, sedangkan indikator kinerja yang tidak didukung secara langsung oleh Program Renstra berbasis anggaran tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi serapan anggaran. Dari 23 (dua puluh tiga) sasaran sebagaimana dimuat dalam tabel di atas, hanya 3 (tiga) sasaran yang menjadi indikator kinerja utama karena capaiannya didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran, yaitu: (1) Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, (2) Persentase gedung pemda yang memenuhi standar, dan (3) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yang didukung Program Renstra berbasis anggaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dapat dicapai dengan tingkat efisiensi yang tinggi, yaitu indikator kinerja Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana (Tingkat Efisiensi 33,59%) dan indikator kinerja Persentase gedung pemda yang memenuhi standar (Tingkat Efisiensi 11,15%). Hal ini menunjukkan bahwa kedua IKU di atas tidak sepenuhnya bertumpu pada pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran, melainkan lebih banyak bertumpu pada pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sedangkan tingkat efisiensi indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan anggaran sangat besar terhadap capaian kinerja mengingat penyerapan anggaran menjadi obyek yang diukur pada indikator kinerja ini.

Selain dari 3 (tiga) indikator utama di atas, indikator-indikator kinerja lain tidak dapat diukur tingkat efisiensinya karena tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian, rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja dapat menggambarkan tingkat efisiensi yang dicapai jika dibandingkan dengan total penyerapan anggaran tahun 2021. Secara keseluruhan, penyerapan serapan anggaran tahun 2021 sebesar 93,66% telah mendukung tercapainya indikator kinerja Dinas Cipta

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan rata-rata tahun 2021 sebesar 100,07%. Ini berarti bahwa tingkat efisiensi secara keseluruhan sebesar 6,41%.

A.5. PERBANDINGAN DENGAN TARGET NASIONAL

Dari semua indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, belum diperoleh data indikator kinerja yang dapat dibandingkan realisasinya secara vertikal dengan realisasi capaian indikator kinerja di tingkat nasional.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan disusun Program berikut anggarannya sebagai operasionalisasi strategi pelaksanaannya. Gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
REALISASI IKU DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG IKU
TAHUN 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------|--------|-----------|---------|--|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| SASARAN STRATEGIS | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak | Persentase | 39% | 28,01% | 128,18% | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 120.972.705.179 | 115.221.334.745 | 95,25% |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|-----|--|---|---------------------------|--------|-----------|---------|---|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| | | sesuai dengan rencana | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program Penatagunaan Tanah | 1.427.281.700 | 560.000.000 | 39,24% |
| 2 | Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur | Persentase gedung pemda yang memenuhi standar | Persentase | 58% | 58,76% | 101,31% | Program Penataan Bangunan Gedung | 314.193.204.484 | 283.271.432.462 | 90,16% |
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | Persentase | 91% | 86,56% | 95,12% | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 120.972.705.179 | 115.221.334.745 | 95,25% |
| | | | | | | | Program Penataan Bangunan Gedung | 314.193.204.484 | 283.271.432.462 | 90,16% |
| | | | | | | | Program Penatagunaan Tanah | 1.427.281.700 | 560.000.000 | 39,24% |
| | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 211.529.296.792 | 207.973.597.880 | 98,32% |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|-----|--|---|---------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) | Persentase | 100% | 99,78% | 99,78% | - | - | - | - |
| 5 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 6 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder | Persentase | 100% | 98,50% | 98,50% | - | - | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|-----|---|--|---------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| | | dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) | | | | | | | | |
| 7 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) | Persentase | 100% | 97,50% | 97,50% | - | - | - | - |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan | Persentase | 100% | 97,50% | 97,50% | - | - | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|-----|--|--|---------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| | | Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|-----|--|---|---------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| 9 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 10 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) | Persentase | 100% | 98,38% | 98,38% | - | - | - | - |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|-----|--|--|---------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| 12 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| | | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 13 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|-----------------------|---|--|---------------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| | | DKI Jakarta (KSD Nomor 70) | | | | | | | | |
| SASARAN KHUSUS | | | | | | | | | | |
| 14 | Terselesainya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 15 | Terselesainya Rekomendasi teknis terkait Trase | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 16 | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pemanfaatan E-Order | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 17 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah | Opini laporan keuangan daerah | WTP | WTP (3) | WTP (3) | 100% | - | - | - | - |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| | yang transparan dan akuntabel | | | | | | | | | |
| 18 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | Persentase | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
| 19 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | Predikat | A (81) | 90,55 | 111,79% | - | - | - | - |
| 20 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | Nilai PMPRB Perangkat Daerah | Nilai | 92 | 84,57 | 91,92% | - | - | - | - |
| SASARAN OPERASIONAL | | | | | | | | | | |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Penyerapan Anggaran | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------|--------|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Program | Pagu | Realisasi | Capaian |
| 21 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | Persentase | 100% | 83,34% | 83,34% | - | - | - | - |
| 22 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | Persentase | 100% | 99,65% | 99,65% | - | - | - | - |
| 23 | Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | Persentase | 100% | 99% | 99% | - | - | - | - |
| RATA-RATA CAPAIAN | | | | | | 100,07% | - | 648.122.488.155 | 607.026.365.087 | 93,66% |

Berikut ini penjelasan mengenai program kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja tahun 2021:

1. Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana (**Penyerapan Anggaran 94,59%**)

Capaian indikator kinerja Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan penyerapan anggaran sebesar 95,255 dan Program Penatagunaan Tanah dengan penyerapan anggaran sebesar 39,24%. Secara gabungan, penyerapan anggaran pada kedua program ini adalah sebesar 94,59% dan mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase

penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18%. Tingginya capaian indikator kinerja dibanding dengan penyerapan anggaran pada kedua program tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran, melainkan pada pelaksanaan tupoksi rutin.

2. Persentase gedung pemda yang memenuhi standar (**Penyerapan Anggaran 90,16%**)

Capaian indikator kinerja Persentase gedung pemda yang memenuhi standar didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran, yaitu Program Penataan Bangunan Gedung. Penyerapan anggaran pada program ini sebesar 90,16% mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase gedung pemda yang memenuhi standar sebesar 101,31%. Tingginya capaian indikator kinerja dibanding dengan penyerapan anggaran pada program tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran, melainkan pada pelaksanaan tupoksi rutin.

3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (**Penyerapan Anggaran 93,66%**)

Capaian indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran, yaitu seluruh program pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021, antara lain:

- a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Penyerapan Anggaran 95,25%)
- b. Program Penataan Bangunan Gedung (Penyerapan Anggaran 90,16%)
- c. Program Penatagunaan Tanah (Penyerapan Anggaran 39,24%)
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Penyerapan Anggaran 98,32%)

Penyerapan anggaran secara gabungan dari keempat program tersebut adalah sebesar 93,66% dan mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 95,12%. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sangat berpengaruh pada capaian indikator kinerja ini.

4. Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (KSD Nomor 17) (**Penyerapan Anggaran -**)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD sebesar 99,78% ini turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

5. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (KSD Nomor 22) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

6. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (KSD Nomor 23) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 98,50% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase gedung pemda yang memenuhi standar sebesar 101,31% dengan penyerapan anggaran sebesar 90,16% dan Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

- 7.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (KSD Nomor 28) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar

100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

7.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 97,50% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

7.3. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 97,50% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

7.4. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

-
- 8.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

- 8.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD No. 61) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

9. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD Nomor 44) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

10. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 98,38% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

11. Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) **(Penyerapan Anggaran -)**
-

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

- 12.1. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

- 12.2. Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase gedung pemda yang memenuhi standar sebesar 101,31% dengan penyerapan anggaran sebesar 90,16% dan Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%.

13. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (KSD Nomor 70) **(Penyerapan Anggaran -)**

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Namun demikian capaian indikator kinerja KSD ini sebesar

100% turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 128,18% dengan penyerapan anggaran sebesar 94,59%..

14. Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP (**Penyerapan Anggaran -**)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

15. Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP (**Penyerapan Anggaran -**)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

16. Persentase Pemanfaatan E-Order (**Penyerapan Anggaran -**)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

17. Opini laporan keuangan daerah (**Penyerapan Anggaran -**)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

-
18. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (***Penyerapan Anggaran -***)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 100% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

19. Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 (***Penyerapan Anggaran -***)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 111,79% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

20. Nilai PMPRB Perangkat Daerah (***Penyerapan Anggaran -***)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 91,92% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

21. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (***Penyerapan Anggaran -***)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 83,34% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

22. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (**Penyerapan Anggaran -**)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 99,65% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

23. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) (**Penyerapan Anggaran -**)

Tidak terdapat penyerapan anggaran dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini karena pelaksanaannya tidak secara langsung didukung oleh Program Renstra berbasis anggaran. Capaian indikator kinerja KSD ini adalah sebesar 99% dan tidak dipengaruhi oleh penyerapan anggaran.

Gambaran realisasi anggaran dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tahun 2021:

Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diukur dengan indikator kinerja persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, yang dilaksanakan dengan 2 (dua) Program dengan total anggaran sebesar Rp 122.399.986.879 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 115.781.334.745 atau 94,59% dari anggaran, yang terdiri dari: (1). Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 120.972.705.179 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 115.221.334.745 atau 95,25% dari anggaran, dan (2). Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran sebesar Rp 1.427.281.700 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 560.000.000 atau 39,24% dari anggaran.

Sedangkan sasaran Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase gedung pemda yang memenuhi standar, yang dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, yakni Program Penataan Bangunan Gedung

dengan anggaran sebesar Rp 314.193.204.484 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 283.271.432.462 atau 90,16% dari anggaran.

Sedangkan sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja berupa Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang dilaksanakan dengan 4 (empat) Program dengan total anggaran sebesar Rp 648.122.488.155 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 607.026.365.087 atau sebesar 93,66% dari anggaran, dengan rincian per program sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 120.972.705.179 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 115.221.334.745 atau 95,25% dari anggaran
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran sebesar Rp 314.193.204.484 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 283.271.432.462 atau 90,16% dari anggaran
- 3) Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran sebesar Rp 1.427.281.700 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 560.000.000 atau 39,24% dari anggaran
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 211.529.296.792 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 207.973.597.880 atau 98,32% dari anggaran

Tahun 2020:

Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diukur dengan indikator kinerja persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, yang dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, yakni Program Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 4.383.611.432 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 4.323.881.419 atau 98,64 % dari anggaran.

Sedangkan sasaran meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar, yang dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, yakni Program Pembangunan

dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran sebesar Rp 4.382.419.600 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 4.381.677.050 atau 99,98 % dari anggaran.

Sedangkan sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja berupa Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang dilaksanakan dengan 4 (empat) Program, yakni Program Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 4.383.611.432 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 4.323.881.419 atau 98,64 % dari anggaran, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran sebesar Rp 4.382.419.600 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 4.381.677.050 atau 99,98 % dari anggaran, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp 45.512.167.346 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 44.971.554.449 atau 98,81 % dari anggaran, dan Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp 438.855.486 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 296.962.946 atau 67,67 % dari anggaran.

Tahun 2019:

Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diukur dengan indikator kinerja persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, yang dilaksanakan dengan 2 (dua) Program pada tahun 2019 yakni, Program Penataan Ruang dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan dengan rencana anggaran dan realisasi penyerapan sebagai berikut:

1. Program Penataan Ruang dengan anggaran awal sebesar Rp. 32.766.571.353 yang diubah pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 20.969.385.963 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 18.722.015.768 atau 89,28 % dari anggaran, dan;

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp 32.104.150.008 yang tidak mengalami perubahan anggaran pada APBD Perubahan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 27.416.289.860 atau 85,39 % dari anggaran.

Sedangkan sasaran meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar, yang dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, yakni Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran awal sebesar Rp 364.745.453.577 yang diubah pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 352.325.725.003 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 156.786.757.508 atau 44,5 %.

Tahun 2018:

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang seharusnya merupakan indicator kinerja program bukan indicator kinerja sasaran, yakni;

1. Rasio kesesuaian rencana tata ruang; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 122% yakni tercapainya rata-rata rasio kesesuaian tata ruang di 5 (lima) wilayah kota administrasi sebesar 71% melebihi rata-rata rasio yang ditargetkan sebesar 58%.
2. Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 103% yakni tercapainya persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani sebesar 93% melebihi persentase penanganan yang ditargetkan sebesar 90%.
3. Persentase penyelesaian administrasi pertanahan; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 101% yakni tercapainya persentase penyelesaian administrasi pertanahan sebesar 74% melebihi persentase penanganan yang ditargetkan sebesar 73%.

Namun demikian ketiga indicator kinerja tersebut merupakan indicator kinerja dari Program yang sama dengan Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang sehingga masih dapat diperbandingkan. Rencana Anggaran dan realisasi penyerapan dari Program tersebut pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp 3.730.964.200,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 3.353.519.000,00 atau 89,88% dari anggaran, dan;
2. Program Penyiapan Akuisisi Tanah (pada tahun 2019 dan seterusnya program ini diganti nomenklatur menjadi Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan) dengan anggaran sebesar Rp 511.016.088,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 424.560.000,00 atau 83,08% dari anggaran.

Sedangkan sasaran meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar yang juga merupakan indicator kinerja program yang rumus atau cara perhitungannya sama dengan indicator kinerja sasaran persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar. Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 106% yakni tercapainya persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar sebesar 55 % melebihi persentase penanganan yang ditargetkan sebesar 52 %. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran sebesar Rp 8.203.773.378,00 yang diubah pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 1.679.990.400,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.096.530.160,00 atau 65,27%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maupun dalam Perjanjian Kinerja Kepala perangkat Daerah. Selain itu, Laporan ini untuk mengukur capaian kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. LKIP juga menggambarkan pengelolaan sumber daya dan berperan sebagai alat kendali serta pengukur kualitas kinerja DCKTRP dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan kepada publik untuk turut mendorong terimplementasikannya prinsip good governance pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Secara umum, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta telah berusaha memaksimalkan pencapaian seluruh sasaran dan indikator kinerjanya termasuk 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dari total 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Indikator Kinerja Utama DCKTRP merupakan indikator kinerja hasil (outcome) yang pencapaiannya tidak dihasilkan secara langsung melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan DCKTRP sendiri melainkan terkait dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sektoral lainnya. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis Perangkat Daerah DCKTRP ini tidak bisa sebagai ukuran keberhasilan DCKTRP semata. Keberhasilan atau kegagalan capaian akan sangat tergantung pada sinergisitas rencana pembangunan yang terpadu antar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat sasaran dengan indikator kinerja yang tidak menggambarkan kinerja SKPD secara langsung melainkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Opini laporan keuangan daerah yang kami sarankan untuk tidak dimasukkan dalam indikator kinerja SKPD.

Dengan dukungan koordinasi yang lebih terpadu, diharapkan kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta masih dapat ditingkatkan pada masa mendatang. DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya untuk membangun dan memperbaiki sistem serta melaksanakan akuntabilitas kinerja secara optimal dalam rangka pertanggung jawaban kinerja kepada publik.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU HERMAWANTO
Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertahanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

HERU HERMAWANTO
NIP 196803121998031010

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama Heru Hermawanto
 NIP 196803121990034040
 Jabatan Kepala Dinas
 Unit Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

| NO | Sasaran Strategis | NO | Indikator Kinerja | Sumber Data | Pengukuran Kinerja | Triwulan | | | | Tahunan | Keterangan |
|--------------------------|---|----|---|-------------|---|----------|-----|-----|-----|---------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | | |
| SASARAN STRATEGIS | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | 1 | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | e SAKIP | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan pada Perda No 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ Rencana aksi yang dilaksanakan diantaranya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan Batching Plant dan penindakan pelanggaran atas kepatuhan membangun Cara perhitungan Selisih antara implementasi dengan rencana dibagi dengan rencana dengan menggunakan paramater subzona/kegiatan sesuai perda RDTR & PZ | N/A | N/A | N/A | 39% | 39% | Persen |
| 2 | Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur | 1 | Persentase gedung pemda yang memenuhi standar | e SAKIP | Gedung Pemda memenuhi standar adalah bangunan gedung pemda sesuai fungsi dan layak secara struktur dan ME yang dikelompokkan menjadi a Bangunan gedung sederhana bertingkat paling tinggi 4 lantai yang berumur sampai dengan 25 tahun b Bangunan gedung tidak sederhana bertingkat lebih dair 4 tahun yang berumur sampai dengan 25 tahun Cara Perhitungan Rasio Gedung pemda sesuai standar pada kondisi akhir tahun dengan kondisi awal tahun | N/A | N/A | N/A | 58% | 58% | Persen |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------|--|------|------|------|------|------|------------|
| 3 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran | e-SAKIP | <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU dan tidak termasuk dana transfer dan pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> | N/A | N/A | N/A | 91% | 91% | Persen |
| 4 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17) | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | Persentase |
| 5 | Meningkatnya akses sanitasi layak | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22) | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | Persentase |
| 6 | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23) | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | Persentase |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|--|------|------|------|------|------|------------|
| 7 | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman memadai modern terintegrasi ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (nomor 28) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (nomor 28) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (nomor 30) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (nomor 30) | 100% | N/A | N/A | N/A | 100% | Persentase |
| | | 3 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31) | N/A | 100% | 100% | N/A | 100% | Persentase |
| | | 4 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73) | 100% | 100% | 100% | N/A | 100% | Persentase |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61) | N/A | 100% | N/A | 100% | 100% | Persentase |
| 9 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 10 | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni tertata rapi dan berkelanjutan bentuk sarana prasarana pendukungnya | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 11 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan akuntabel serta berbasis teknologi informasi | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63) | 100% | N/A | 100% | N/A | 100% | Persentase |
| 12 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53) | e Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53) | 100% | 100% | N/A | 100% | 100% | Persentase |
| | | 2 | Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor (72) | e Monev KSD | Realisasi rencana aksi KSD mengenai Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor(72) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------------|---|------|------|------|------|------|------------|
| 13 | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | 1 | Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (nomor 70) | e-Monev KSD | Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (nomor 70) | 100% | 100% | N/A | N/A | 100% | Persentase |
| SASARAN KHUSUS | | | | | | | | | | | |
| 14 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda | 1 | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP | e-Kinerja | Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi jumlah permohonan masuk yang lengkap dikali 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 15 | Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase | 1 | Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP | e-Kinerja | Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trace yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi permohonan masuk yang lengkap dikali 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 16 | Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Persentase Pemanfaatan E-Order | e-Kinerja | Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100% Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 17 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | 1 | Opini laporan keuangan daerah | e-Kinerja | Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan keandalan sistem pengendalian internal kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK. WTP=3(100%) WDP=2(75%) TW=1(50%) TMP=0(25%)) | N/A | 3 | N/A | N/A | 3 | WTP |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------|--|------|------|------|--------|--------|------------|
| 18 | Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah | 1 | Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | e Kinerja | <p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang</p> <p>Perhitungan</p> <p>a) Bobot 30% PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan</p> <p>b) Bobot 20% PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan</p> <p>c) Bobot 20% PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan</p> <p>d) Bobot 30% PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note realisasi editorial plan min 15 materi per triwulan)</p> | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 19 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 | e Kinerja | Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai 81) | N/A | N/A | N/A | A (81) | A (81) | Predikat |


| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|-----------|--|------|------|------|------|------|------------|
| 20 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur | 1 | Nilai PMPRB Perangkat Daerah | e Kinerja | Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut AA = >90 100 A = >80 90 BB = >70-80 B = >60 70 CC = >50-60 C = >30 50 D = 0 30 | N/A | N/A | N/A | 92 | 92 | Nilai |
| SASARAN OPERASIONAL | | | | | | | | | | | |
| 21 | Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur | 1 | Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur | e Kinerja | Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim e-office arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 22 | Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat | 1 | Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat | CRM | Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase |
| 23 | Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | 1 | Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) | e Kinerja | Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Persentase |

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta



Anies Rasyid Baswedan, Ph D

Jakarta 2021
Kepala Cipta Karya Tata Ruang
dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto
NIP 196803121998031010



PRESTASI



PRESTASI

Selamat

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA

1st Place - 3D Map Category

ESRI USER CONFERENCE 2021



JAKARTA 3D URBAN REGENERATION - KEMAYORAN
bit.ly/3DKemayoran





PRESTASI

Bhumandala Award 2021



Telah Meraih Penghargaan
Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial
Bhumandala Award 2021

Dalam Inovasi
Jakarta Satu - Informasi Rencana Kota (IRK)

Sebagai
Inovasi Terbaik



PRESTASI

BHUMANDALA KANAKA AWARD 2020



Mendapatkan 2 penghargaan, yaitu :
Penghargaan Bhumandala Kanaka Simpul Terbaik dan
Bhumandala Kencana Geoportal terbaik kategori Provinsi.

PRESTASI

GEO INNOVATION AWARD 2019



Penghargaan untuk mendukung industri 4.0 Geospasial atas inovasi dalam implementasi GIS (Geographic Information System) untuk mendukung kebijakan Satu Peta Indonesia yang diselenggarakan oleh Esri Indonesia.

PRESTASI

BHUMANDALA KANAKA AWARD 2018



Penghargaan sebagai Provinsi dengan pembangunan simpul jaringan terbaik dan aktif, serta mengikuti sistem referensi geospasial nasional se-Indonesia.



Diagam Penghargaan

Diberikan kepada

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Sebagai Nominasi Kategori Badan Publik Dinas
dalam “EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2018”

Yang diselenggarakan oleh:

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, 7 Desember 2018
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
Ketua


Alamsyah Basri, M.H.